

**FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PARTISIPASI PEMILIH
DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PILKADA KABUPATEN PESAWARAN 2024
(Studi Pada Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan)**

(Skripsi)

Oleh

**ALFIANI NUR INDAH SARI
NPM 2216021125**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA KABUPATEN PESAWARAN 2024 (Studi Pada Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan)

Oleh

ALFIANI NUR INDAH SARI

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi permasalahan penting dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024. Di Desa Sukajaya Lempasing, tingkat partisipasi pemilih menurun dari 59,32% saat Pilkada menjadi 52,42% saat Pemungutan Suara Ulang. Kondisi ini menunjukkan persoalan dalam keterlibatan masyarakat pada pemilihan ulang. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab menurunnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024 di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian didasarkan pada teori bentuk partisipasi politik menurut Newton dan Deth (2017) yang membedakan partisipasi politik ke dalam dimensi konvensional dan non konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam PSU turun akibat dominannya faktor non konvensional dibandingkan faktor konvensional. Pada dimensi konvensional, penggunaan hak pilih masih dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk keterlibatan politik, namun tingkat kesadaran dan keterlibatan aktif belum merata. Sementara itu, pada dimensi non konvensional ditemukan bahwa sikap apatis akibat kejenuhan politik, rendahnya keterlibatan dalam kegiatan politik, hambatan administratif berupa jarak TPS dan pengurangan jumlah TPS, serta hambatan kelembagaan akibat minimnya sosialisasi dan belum optimalnya peran penyelenggara pemilu menjadi faktor utama yang secara signifikan memengaruhi penurunan partisipasi pemilih. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh keterbatasan struktural dan kelembagaan yang belum mampu menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan merata.

Kata Kunci: Partisipasi Pemilih, Pemungutan Suara Ulang, Pilkada

ABSTRACT

FACTORS CAUSING THE DECLINE IN VOTER PARTICIPATION IN THE 2024 RE-VOTING OF THE PESAWARAN REGENCY REGIONAL ELECTION (Study in Sukajaya Lempasing Village, Teluk Pandan District)

By

ALFIANI NUR INDAH SARI

Declining levels of community participation have become an important issue in the implementation of the Re-voting in the 2024 Pesawaran Regency Regional Election. In Sukajaya Lempasing Village, voter participation decreased from 59.32% during the Regional Election to 52.42% during the Re-voting. This condition indicates problems in community involvement in the re-election process. This study aims to identify the factors causing the decline in voter participation in the implementation of the Re-voting in the 2024 Pesawaran Regency Regional Election in Sukajaya Lempasing Village, Teluk Pandan District. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The analysis is based on the theory of forms of political participation according to Newton and Deth (2017), which distinguishes political participation into conventional and non-conventional dimensions. The results show that community political participation in the re-voting decreased due to the dominance of non-conventional factors compared to conventional factors. In the conventional dimension, the use of voting rights is still carried out by some members of the community as a form of political involvement, but the level of awareness and active engagement is not evenly distributed. Meanwhile, in the non-conventional dimension, apathetic attitudes, low involvement in political activities, administrative barriers related to distance and reduced polling stations, and limited socialization from organizers significantly influence the decline in voter participation, reflecting structural and institutional constraints within the re-voting implementation context overall.

Keywords: Voter Participation, Revote, Regional Head Election

**FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PARTISIPASI PEMILIH
DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PILKADA KABUPATEN PESAWARAN 2024
(Studi Pada Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan)**

Oleh

**ALFIANI NUR INDAH SARI
2216021125**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA KABUPATEN PESAWARAN 2024 (STUDI PADA DESA SUKAJAYA LEMPASING KECAMATAN TELUK PANDAN)**

Nama Mahasiswa : *Alfiani Nur Indah Sari*

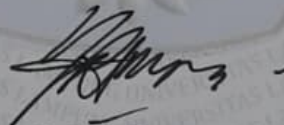
Nomor Pokok Mahasiswa : 2216021125

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

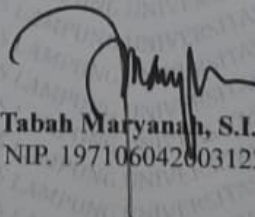
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106042603122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

Penguji Utama : Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 April 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 08 April 2026



Alfiani Nur Indah Sari
NPM. 2216021125

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alfiani Nur Indah Sari, dilahirkan di Negeri Katon pada tanggal 01 Juli 2004, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 36 Negeri Katon dan menamatkannya pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 18 Pesawaran hingga lulus pada tahun 2019, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Gedong Tataan pada tahun 2022. Melalui jalur SBMPTN pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi. Pada tahun 2024, penulis bergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) LPM Republica sebagai Manager Digital. Selanjutnya, pada tahun 2025 penulis aktif di BEM FISIP Universitas Lampung dengan jabatan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. Penulis juga melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Purwosari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari, yaitu pada bulan Januari hingga Februari 2025. Kemudian pada bulan Maret 2025, penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) FISIP Unila selama enam bulan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

MOTTO HIDUP

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Pantang dalam menyerah, pantang dalam berpatah arang. Tidak ada kata gagal untuk orang yang enggan berhasil.”

(QS. Yusuf: 87)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan untuk menguji seberapa kokoh dan kuat akarnya.”

Ali bin Abi thalib

“Untuk setiap luka yang membuatmu patah, semoga Tuhan menyembuhkan dengan cara yang tak pernah disangka dan menguatkan lebih dari sebelumnya.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin.

Telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Supeno dan Widi

Kakak dan Adik tercinta

Anwar dan Faiz

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Faktor Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024 (Studi Pada Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dan pemimpin bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga dengan penuh kesabaran dan ketulusan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian secara akademis, tetapi juga memberikan pelajaran berharga mengenai ketelitian dan integritas dalam penulisan karya ilmiah. Semoga seluruh ilmu, waktu, dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan dari Allah SWT.
8. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran, masukan, serta arahan dalam proses perbaikan skripsi sehingga menghasilkan karya yang lebih baik. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan Allah SWT dalam setiap langkah dan perjalanan.
9. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
10. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dedikasi, ilmu, dan pengabdian yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
11. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Ibu Merta dan Mba Wulan, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan administrasi perkuliahan selama ini. Terima kasih atas kesediaan dan bantuan yang diberikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

12. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Supeno dan Ibu Widi, dua permata yang membantu penulis mengarungi derasnya arus kehidupan, terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan atas segala doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tidak terhitung, serta dukungan moral dan material yang selalu diberikan tanpa pamrih. Terima kasih atas kesabaran dalam menghadapi setiap keluh kesah, atas nasihat yang menguatkan di saat lelah, dan atas keyakinan yang selalu ditanamkan bahwa penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.
13. Untuk kakakku Anwar dan adikku Faiz, terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, menjadi penguat di saat penulis merasa lelah, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.
14. Untuk seluruh pegawai KPU Provinsi Lampung, terutama Sub Bagian Partisipasi Masyarakat, penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan, bimbingan, keterbukaan informasi, serta pengalaman berharga yang diberikan selama proses kegiatan magang berlangsung. Bantuan dan kerja sama yang diberikan sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Untuk “Ibu Peri”, Anggi, Dewi, Nesta, Pitri, Rachel, dan Salwa, sahabat-sahabat terbaik penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, tawa, serta cerita yang selalu menemani perjalanan akademik penulis. Terima kasih karena selalu hadir dalam setiap fase, baik suka maupun duka, hingga akhirnya kita sampai di titik ini bersama. Terima kasih telah berjalan bersama, menjadi tempat kembali, dan menetap dalam riuh bahagia maupun sunyi yang menyimpan luka.
16. Untuk “Seng-Seng”, Aul, Dita, Kapi, dan Rico, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, diskusi, serta dukungan yang membuat proses perkuliahan dan penyusunan skripsi terasa lebih ringan dan penuh warna. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Terima kasih penulis ucapkan karena tidak meninggalkan, karena sudah mau menjadi orang baik.
17. Untuk Liza, Nanda, Wisnu, Niluh, Framesty, Anisa, dan Danu, teman-teman selama magang MBKM di KPU Provinsi Lampung, terima kasih atas kerja sama, pengalaman, pembelajaran, serta kebersamaan yang begitu berharga.

Proses magang yang kita jalani bersama menjadi salah satu pengalaman penting yang turut mendukung penyusunan skripsi ini.

18. Untuk Aura, teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi, terima kasih atas kebersamaan, saling dukung, serta semangat yang selalu diberikan selama proses ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, dan saling menguatkan di tengah berbagai tantangan dan tekanan dalam menyelesaikan skripsi.
19. Untuk seluruh informan dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu, keterbukaan, serta informasi yang telah diberikan. Partisipasi dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dan menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyusunan skripsi ini.
20. Terakhir, untuk seseorang yang menapaki jalan yang tak selalu lurus, dan meletakkan sisa keberaniannya untuk bertahan; Diri sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap kuat di tengah rasa lelah, tetap berusaha di tengah keraguan, dan tetap melangkah hingga akhirnya mampu menyelesaikan tahap ini dengan penuh tanggung jawab. Selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya. Terima kasih sudah sampai, terima kasih sudah selesai.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, namun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, Aamiin.

Bandar Lampung, 08 April 2026
Penulis

Alfiani Nur Indah Sari
NPM. 2216021125

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Partisipasi Pemilih	15
2.1.1 Definisi Partisipasi	15
2.1.2 Definisi Partisipasi Pemilih.....	16
2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi	17
2.1.4 Faktor-Faktor Partisipasi.....	18
2.2 Pemungutan Suara Ulang	19
2.2.1 Definisi Pemungutan Suara Ulang.....	19
2.2.2 Syarat Pemungutan Suara Ulang	20
2.3 Perilaku Pemilih	21
2.4 Pemilihan Kepala Daerah	22
2.5 Kerangka Pikir.....	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Informan Penelitian	30
3.5 Jenis dan Sumber Data	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	36
3.8 Teknik Analisis Data	36
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	37

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Desa Sukajaya Lempasing	39
4.1.1 Sejarah Desa.....	39
4.1.2 Monografi Desa	40
4.1.3 Struktur Organisasi	44
4.2 Gambaran Umum Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.....	44
4.2.1 Gambaran Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024	44
4.2.2 Profil dan Visi Misi Calon	45
4.2.3 Partai Pengusung.....	48
4.2.4 Hasil Perolehan Suara	48
4.3 Gambaran Umum PSU Kabupaten Pesawaran Tahun 2024	49
4.3.1 Gambaran PSU Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.....	49
4.3.2 Profil dan Visi Misi Calon	50
4.3.3 Partai Pengusung.....	52
4.3.4 Hasil Perolehan Suara	53
4.4 Bentuk Perilaku Politik.....	53
4.4.1 Konvensional	55
4.4.1.1 Kewajiban.....	56
4.4.1.2 Kesadaran	66
4.4.1.3 Aktif dalam Kegiatan Politik.....	73
4.4.2 Non Konvensional	78
4.4.2.1 Apatis.....	79
4.4.2.2 Sikap Pasif terhadap Kegiatan Politik	87
4.4.2.3 Aksi Mogok	95
4.4.2.4 Hambatan Administratif	99
4.4.2.5 Hambatan Kelembagaan.....	103
4.4.2.6 Budaya Politik Parokial	114
V. SIMPULAN DAN SARAN	119
5.1 Simpulan.....	119
5.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persentase Pengguna Hak Pilih Tiap Kecamatan (Pilkada 2024)	8
2. Persentase Pengguna Hak Pilih Tiap Kecamatan (PSU).....	8
3. Data Pengguna Hak Pilih Tiap Desa (Pilkada 2024)	9
4. Data Pengguna Hak Pilih Tiap Desa (PSU).....	10
5. Bentuk Konkrit Partisipasi Pemilih oleh Newton & Deth (2017).....	29
6. Informan Penelitian	32
7. Daftar Kepala Desa Sukajaya Lempasing.....	41
8. Data Kelembagaan Desa Sukajaya Lempasing	42
9. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
10. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	42
11. Mata Pencaharian Desa Sukajaya Lempasing.....	43
12. Data Tingkat Pendidikan Desa Sukajaya Lempasing	43
13. Daftar Partai Politik Pengusung Pasangan Calon di Pilkada	48
14. Daftar Partai Politik Pengusung Pasangan Calon di PSU	52
15. Triangulasi Metode Indikator Kewajiban	62
16. Triangulasi Metode Indikator Kesadaran.....	70
17. Triangulasi Metode Indikator Aktif dalam Kegiatan Politik	77
18. Triangulasi Metode Indikator Apatis	84
19. Triangulasi Metode Indikator Sikap Pasif terhadap Kegiatan Politik.....	92
20. Triangulasi Metode Indikator Aksi Mogok.....	97
21. Persebaran TPS saat PSU di Sukajaya Lempasing	100
22. Triangulasi Metode Indikator Hambatan Administratif.....	102
23. Data Sosialisasi KPU Kabupaten Pesawaran 2025	105
24. Triangulasi Metode Indikator Hambatan Kelembagaan	111
25. Triangulasi Metode Indikator Budaya Politik Parokial.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024.....	4
2. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran 2025.....	6
3. Kerangka Pikir	26
4. Dokumentasi PSU di Sukajaya Lempasing.....	58
5. Ajakan Memilih di Media Resmi KPU dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran ..	68
6. Kegiatan PKK Desa Sukajaya Lempasing	74
7. Kegiatan NU Desa Sukajaya Lempasing	76
8. Visi Misi Paslon Bupati dan Wakil Bupati saat PSU.....	83
9. Sosialisasi di Balai Desa Sukajaya Lempasing	89
10. Data Karang Taruna Desa Sukajaya Lempasing.....	92
11. Soswatif di MA Darur Ridho Desa Hanura	109

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
Bimtek	: Bimbingan Teknis
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPK	: Daftar Pemilih Khusus
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPTb	: Daftar Pemilih Tambahan
Golput	: Golongan Putih
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
NU	: Nahdlatul Ulama
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
PAN	: Partai Amanat Nasional
Panwasdes	: Panitia Pengawas Pemilihan Desa
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PKK	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PSU	: Pemungutan Suara Ulang
Sosdiklih	: Sosialisasi Pendidikan Pemilih
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UUD	: Undang-Undang Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi, yang menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu didefinisikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain pemilu yang dilaksanakan secara nasional, terdapat pula pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bagian dari proses demokrasi di tingkat lokal.

Pilkada pada hakikatnya merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin terbaik bagi daerahnya. Melalui mekanisme ini, diharapkan lahir kepala daerah yang mampu menjawab harapan mayoritas rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Harapan tersebut juga menuntut adanya perubahan nyata yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat (Akbar, 2016).

Keberhasilan penyelenggaraan pilkada tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, melainkan juga oleh sejauh mana masyarakat turut berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi tersebut. Partisipasi masyarakat, khususnya dalam bentuk pemberian suara di tempat pemungutan suara, menjadi indikator utama

kualitas demokrasi suatu negara. Tanpa partisipasi rakyat, pemilu kehilangan legitimasi moral dan politiknya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memahami pentingnya hak pilih serta merasa terdorong untuk menggunakannya (Putri dkk., 2023).

Secara konseptual, partisipasi politik adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memengaruhi pengambilan keputusan publik. Partisipasi politik mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari memilih dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, mengikuti kampanye, hingga terlibat dalam diskusi dan advokasi isu-isu publik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu maupun kelompok dalam aktivitas politik, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan tujuan turut serta dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk dalam memengaruhi arah kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2007). Salah satu bentuk nyata dari partisipasi politik ini adalah penggunaan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah, yang bertujuan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Pada pelaksanaan pilkada, tindakan yang paling nyata adalah keikutsertaan dalam memberikan suara. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan kesadaran politik warga, tetapi juga menjadi sarana kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Pentingnya partisipasi pemilih dalam pilkada terletak pada peran strategisnya dalam memperkuat legitimasi hasil pemilu dan pemerintahan yang terbentuk. Partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa rakyat percaya pada proses demokrasi dan memiliki harapan terhadap pemimpin yang dipilih. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat menjadi indikator adanya masalah, seperti apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap lembaga pemilu, atau kegagalan dalam pendidikan pemilih. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi politik harus menjadi perhatian utama dalam setiap penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Terkait dinamika pilkada di Indonesia, terdapat kondisi di mana proses pemilihan harus diulang akibat adanya pelanggaran yang bersifat substansial. Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan salah satu mekanisme korektif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. PSU diselenggarakan sebagai bentuk penegakan keadilan elektoral apabila terdapat pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil pemilu. PSU juga menjadi wujud komitmen negara dalam menjaga integritas demokrasi melalui pemilu yang bersih, adil, dan transparan.

Salah satu kasus pelaksanaan PSU terjadi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, pasca-Pemilu 2024. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, pasangan calon nomor urut 1 dinyatakan didiskualifikasi dari kepesertaan dalam Pilkada karena pelanggaran administratif yang serius. Putusan ini memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran untuk menyelenggarakan PSU di seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran sebagai bentuk koreksi atas proses pemilu yang dinilai cacat hukum. PSU ini menjadi bagian penting dalam menjaga keabsahan hasil pemilu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih ulang secara adil.

Berdasarkan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran, tingkat partisipasi pemilih dalam PSU hanya mencapai 64,50 persen, lebih rendah dibandingkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak sebelumnya yang berada di angka 71,89 persen. Penurunan sebesar kurang lebih 7 persen ini menjadi indikator penting bahwa pelaksanaan PSU belum mampu menarik antusiasme masyarakat secara optimal. Rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kejenuhan politik akibat pemilu yang berulang, kurangnya informasi mengenai pelaksanaan PSU, lemahnya sosialisasi dari penyelenggara, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, atau kekecewaan masyarakat terhadap dinamika hukum dan politik yang terjadi (Wiguna, 2025).

No	Uraian	Rincian														
		Gedong	Negeri	Tegineeng	Way	Padang	Punduh	Kedondong	Marga	Way	Teluk	Way	Jumlah			
I	Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih	Tataan	Katon		Lima	Cermin	Pidada		Punduh	Khilau	Pandan	Ratai	Akhir			
A	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	38.670	27.718	22.054	13.939	10.561	5.656	14.101	5.780	11.551	13.704	13.436	177.170		
		PR	38.376	26.323	21.496	13.582	10.157	5.312	13.444	5.418	10.965	13.126	12.610	170.809		
		JML	77.046	54.041	43.550	27.521	20.718	10.968	27.545	11.198	22.516	26.830	26.046	347.979		
B	Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	Pengguna Hak Pilih														
		Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	8	2	6	2	0	2	2	2	0	0	4	1	27
			PR	9	1	7	2	4	2	2	2	0	0	2	0	29
			JML	17	3	13	4	4	4	4	4	0	0	6	1	56
		Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	116	12	48	16	9	5	14	0	17	34	9	280	
			PR	144	17	69	17	13	7	15	0	38	45	13	378	
			JML	260	29	117	33	22	12	29	0	55	79	22	658	
		Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	26.670	20.227	15.737	10.498	6.578	3.899	9.099	3.927	7.378	8.172	9.374	122.559	
			PR	29.836	21.114	16.645	10.513	6.900	3.822	9.269	3.926	7.174	9.117	9.270	12.586	
			JML	57.506	41.341	32.382	21.011	13.478	7.721	18.368	7.853	14.552	17.289	18.644	250.145	

No	Uraian	Rincian											
		Gedong Tataan	Negeri Katon	Tegineneng	Way Lima	Padang Cernin	Punduh Pidada	Kedondong	Marga Punduh	Way Khilau	Teluk Pandan	Way Ratai	Jumlah Akhir
Nomor dan Nama Pasangan Calon													
1	Hj. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. – Supriyanto, S.P., M.M.	35.913	24.279	14.199	11.810	8.143	3.990	11.168	5.382	9.345	9.089	10.073	143.391
2	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. - Antonius Muhammad Ali, S.H.	19.562	15.667	17.200	8.633	4.750	3.469	6.506	2.187	4.574	7.383	7.694	97.625
Uraian													
III	Data Suara Sah dan Tidak Sah	Gedong Tataan	Negeri Katon	Tegineneng	Way Lima	Padang Cernin	Punduh Pidada	Kedondong	Marga Punduh	Way Khilau	Teluk Pandan	Way Ratai	Jumlah Akhir
A	Jumlah seluruh suara sah	55.475	39.946	31.399	20.443	12.893	7.459	17.674	7.569	13.919	16.472	17.767	241.016
B	Jumlah suara tidak sah	2.031	1.395	983	568	585	262	694	284	633	817	877	9.129
C	Jumlah seluruh suara sa dan suara tidak sah	57.506	41.341	32.382	21.011	13.478	7.721	18.368	7.853	14.552	17.289	18.644	250.145

Gambar 1. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024.

Sumber: JDIH KPU Kabupaten Pesawaran (Data diolah peneliti, 2025)

No	Uraian	Rincian												
		Gedong Tataan	Negeri Katon	Tegineneng	Way Lima	Padang Cermih	Punduh Pidada	Kedondong	Marga Punduh	Way Khilau	Teluk Pandan	Way Ratai	Jumlah Akhir	
A	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	38.670	27.718	22.054	13.939	10.561	5.656	14.101	5.780	11.551	13.704	13.436	177.170
		PR	38.376	26.323	21.496	13.582	10.157	5.312	13.444	5.418	10.965	13.126	12.610	170.809
		JML	77.046	54.041	43.550	27.521	20.718	10.968	27.545	11.198	22.516	26.830	26.046	347.979
B	Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	Pengguna Hak Pilih												
		LK	24.311	17.925	13.102	9.023	5.858	3.649	7.717	3.559	6.551	7.199	8.679	107.573
		PR	27.151	19.303	14.757	9.568	6.405	3.657	8.278	3.573	6.635	8.330	8.897	116.554
		JML	51.462	37.228	27.859	18.591	12.263	7.306	15.995	7.132	13.186	15.529	17.576	224.127
		LK	8	2	4	2	0	1	1	0	1	2	1	22
		PR	8	0	1	2	3	3	2	0	0	1	0	20
		JML	16	2	5	4	3	4	3	0	1	3	1	42
		LK	51	7	21	8	4	4	7	0	6	11	6	125
		PR	62	10	27	8	3	5	6	0	12	14	9	156
		JML	113	17	48	16	7	9	13	0	18	25	15	281
		LK	24.370	17.934	13.127	9.033	5.862	3.654	7.725	3.559	6.558	7.212	8.686	107.720
		PR	27.221	19.313	14.785	9.578	6.411	3.665	8.286	3.573	6.647	8.345	8.906	116.730
		JML	51.591	37.247	27.912	18.611	12.273	7.319	16.011	7.132	13.205	15.557	17.592	224.450

No	Uraian	Rincian											
		Gedong	Negeri	Tegineneng	Way	Padang	Punduh	Kedondong	Marga	Way	Teluk	Way	Jumlah
Nomor dan Nama Pasangan Calon													
1	Supriyanto, S.P., M.M. - Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	26.078	13.958	7.258	8.633	4.614	2.270	8.323	2.982	5.821	3.536	5.009	88.482
2	Hj. Nanda Indra B, S.E., M.M. - Antonius Muhammad Ali, S.H.	23.520	22.176	19.713	9.521	7.184	4.840	7.209	3.908	6.966	11.611	12.067	128.715
Uraian													
III	Data Suara Sah dan Tidak Sah	Gedong Tataan	Negeri Katon	Tegineneng	Way Lima	Padang Cernin	Punduh Pidada	Kedondong	Marga Punduh	Way Khilau	Teluk Pandan	Way Ratai	Jumlah Akhir
A	Jumlah seluruh suara sah	49.598	36.134	26.971	18.154	11.798	7.110	15.532	6.890	12.787	15.147	17.076	217.197
B	Jumlah suara tidak sah	1.993	1.113	941	457	475	209	479	242	418	410	516	7.253
C	Jumlah seluruh suara sa dan suara tidak sah	51.591	37.247	27.912	18.611	12.273	7.319	16.011	7.132	13.205	15.557	17.592	224.450

Gambar 2. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran 2025.

Sumber: JDIH KPU Kabupaten Pesawaran (Data diolah peneliti, 2025)

Dari data pada gambar 1 dan 2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengguna hak pilih per kecamatan pada saat PSU menurun dibandingkan saat Pilkada. Berikut adalah persentase pengguna hak pilih tiap kecamatan pada saat Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024:

Tabel 1. Persentase Pengguna Hak Pilih Tiap Kecamatan (Pilkada 2024)

No	Kecamatan	DPT	Pengguna Hak Pilih	Persentase
1	Negeri Katon	54.041	41.309	76,44%
2	Way Lima	27.521	20.974	76,22%
3	Gedong Tataan	77.046	57.229	74,30%
4	Tegineneng	43.550	32.252	74,06%
5	Way Ratai	26.046	18.621	71,51%
6	Punduh Pidada	10.968	7.705	70,26%
7	Marga Punduh	11.198	7.853	70,14%
8	Kedondong	27.545	18.335	66,55%
9	Padang Cermin	20.718	13.452	64,93%
10	Way Khilau	22.516	14.497	64,39%
11	Teluk Pandan	26.830	17.204	64,09%

Sumber: JDIH KPU Kabupaten Pesawaran (Data diolah peneliti, 2025)

Di bawah ini adalah persentase pengguna hak pilih tiap kecamatan pada saat Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024:

Tabel 2. Persentase Pengguna Hak Pilih Tiap Kecamatan (PSU)

No	Kecamatan	DPT	Pengguna Hak Pilih	Persentase
1	Negeri Katon	54.041	37.228	68,89%
2	Way Lima	27.521	18.591	67,57%
3	Way Ratai	26.046	17.576	67,52%
4	Gedong Tataan	77.046	51.452	66,79%
5	Punduh Pidada	10.968	7.306	66,61%

No	Kecamatan	DPT	Pengguna Hak Pilih	Persentase
6	Tegineneng	43.550	27.859	63,97%
7	Marga Punduh	11.198	7.132	63,70%
8	Padang Cermin	20.718	12.263	59,19%
9	Way Khilau	22.516	13.186	58,54%
10	Kedondong	27.545	15.995	58,07%
11	Teluk Pandan	26.830	15.529	57,88%

Sumber: JDIH KPU Kabupaten Pesawaran (Data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Teluk Pandan merupakan wilayah dengan jumlah pengguna hak pilih terkecil pada Pilkada 2024 dengan persentase 64,09% maupun saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran dengan persentase 57,88%. Adapun data mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah pengguna hak pilih di setiap desa dalam Kecamatan Teluk Pandan pada Pilkada dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Data Pengguna Hak Pilih Tiap Desa (Pilkada 2024)

No	Desa	DPT	Pengguna Hak Pilih	Persentase
1	Munca	812	615	75,74%
2	Talang Mulya	1.122	831	74,06%
3	Tanjung Agung	2.774	1.991	71,79%
4	Sidodadi	1.754	1.170	66,72%
5	Batu Menyan	1.774	1.159	65,34%
6	Cilimus	1.671	1.086	64,93%
7	Hanura	4.664	2.975	63,79%
8	Gebang	4.779	2.934	61,39%
9	Hurun	2.340	1.395	59,62%
10	Sukajaya Lempasing	5.140	3.048	59,32%

Sumber: KPU Provinsi Lampung (Data diolah peneliti, 2025)

Di bawah ini adalah data pengguna hak pilih setiap desa di Kecamatan Teluk Pandan pada saat PSU Pilkada 2024:

Tabel 4. Data Pengguna Hak Pilih Tiap Desa (PSU)

No	Desa	DPT	Pengguna Hak Pilih	Persentase
1	Talang Mulya	1.122	757	67,47%
2	Munca	812	544	67,06%
3	Tanjung Agung	2.774	1.780	64,15%
4	Batu Menyan	1.774	1.056	59,59%
5	Sidodadi	1.754	1.029	58,68%
6	Cilimus	1.671	983	58,84%
7	Gebang	4.779	2.775	58,07%
8	Hanura	4.664	2.609	55,92%
9	Hurun	2.340	1.302	55,64%
10	Sukajaya Lempasing	5.140	2.694	52,42%

Sumber: KPU Provinsi Lampung (Data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa tingkat partisipasi terendah pada Pilkada maupun PSU Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 terdapat di Desa Sukajaya Lempasing, yakni sebesar 59,32% dari total DPT pada saat Pilkada dan menurun menjadi 52,42% pada saat PSU.

Menurunnya partisipasi politik dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran politik menjadi salah satu faktor dominan rendahnya partisipasi, terbatasnya kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu dan pilkada juga berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat, rendahnya kredibilitas calon pemimpin di mata masyarakat menimbulkan keraguan untuk berpartisipasi, dan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi politik memperkuat sikap apatis masyarakat (Halilah, 2022).

Fenomena ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan PSU bukan hanya persoalan teknis dan hukum, tetapi juga berdampak pada psikologis dan antusiasme pemilih. Dalam konteks inilah penting dilakukan kajian ilmiah yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi turunnya partisipasi masyarakat dalam PSU.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai apa faktor yang menyebabkan turunnya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pesawaran saat Pemunutan Suara Ulang (PSU) dengan judul “Faktor Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024 (Studi Pada Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan)”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan aktor-aktor masyarakat sipil dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi politik, khususnya dalam menghadapi kondisi PSU yang bersifat korektif namun tetap harus menjamin legitimasi demokratis. Sebagai bahan referensi, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu guna menunjang dan membangun kerangka pikir untuk memperkuat penelitian.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ismed Kelibay dkk. (2023) yang menggunakan metode pengabdian kepada masyarakat melalui observasi, sosialisasi langsung, dan evaluasi di Kampung Teluk Dore, Kabupaten Sorong. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi secara intensif, termasuk melalui media sosial dan perekrutan relawan demokrasi, berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dari 67,3% (2017) menjadi 85% (2019).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Abdul Latief dan Abd. Rahman (2025) yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam bentuk penggunaan hak suara, keikutsertaan dalam kepanitiaan pemilu, dan kampanye

politik, yang didorong oleh faktor sosialisasi, daya tarik calon, serta kesadaran politik.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Albert Hernando Santoso dan Mulyana (2023) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat hanya 59% akibat adanya calon tunggal, situasi pandemi COVID-19, serta lemahnya inovasi sosialisasi oleh KPU. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik dapat menurun karena kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Akbar Karunia Ramadhani, Fadillah Agil Saputra, dan Muhammad Salman Alfarizy (2025) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya rendahnya kesadaran politik, kekecewaan terhadap janji politik yang tidak ditepati, serta terbatasnya informasi yang diterima masyarakat terkait pemilihan. Selain itu, apatisisme politik, kondisi ekonomi yang menuntut prioritas pekerjaan dibanding memilih, serta banyaknya pemilih usia muda yang merantau juga turut memperparah penurunan partisipasi.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, dan Revi Jeane Putri (2024) yang menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi untuk mengungkap faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam PSU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan partisipasi disebabkan oleh ketidakjelasan informasi mengenai prosedur PSU, kebingungan tentang status pemilih (DPT/DPTb/DPK), serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap legitimasi PSU. Ketidakpercayaan terhadap praktik PSU dan minimnya sosialisasi dari penyelenggara memperparah kondisi.

Jika dilihat dari rumusan masalah yang dibahas, penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menyoroti persoalan rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu maupun pilkada. Penelitian Ismed Kelibay dkk. menyoroti masalah kurangnya sosialisasi politik yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, sementara penelitian Abdul Latief dan Abd. Rahman mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilu serentak, dan penelitian Albert Hernando Santoso bersama Mulyana mengangkat rendahnya partisipasi akibat calon tunggal dan pandemi. Demikian pula, penelitian Akbar Karunia Ramadhani dkk. merumuskan masalah rendahnya partisipasi di Tulungagung karena faktor sosial-ekonomi dan akses informasi, serta penelitian Zakly Hanafi Ahmad dkk. mengangkat persoalan menurunnya partisipasi pada PSU di Jambi karena lemahnya sosialisasi dan pemahaman prosedur pemilu.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa rumusan masalah dalam skripsi berfokus pada faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih dalam konteks khusus PSU Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dan sosialisasi, tetapi juga berkaitan dengan rasa jenuh masyarakat terhadap pemilu berulang, rendahnya kepercayaan terhadap proses politik, serta kurangnya motivasi pemilih untuk kembali berpartisipasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apa faktor penyebab menurunnya partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan PSU pada Pilkada di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian partisipasi politik dan tata kelola pemilu di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks PSU, serta menjadi rujukan bagi penguatan teori-teori partisipasi politik dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi KPU, Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami faktor-faktor penyebab turunnya partisipasi masyarakat pada PSU. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan strategi, kebijakan, atau pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu selanjutnya, terutama dalam kondisi pasca sengketa atau konflik pemilu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi Pemilih

2.1.1 Definisi Partisipasi

Kaehe dkk. (2019) menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan individu maupun kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik melalui pernyataan maupun tindakan nyata, yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan tenaga, pemikiran, waktu, modal, maupun keahlian.

Selanjutnya, menurut Sulistiyorini dkk. (2015), partisipasi dapat dipahami sebagai bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang, baik secara fisik ataupun nonfisik, dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Purba & Djamin (2015) menambahkan bahwa partisipasi itu juga merupakan keterlibatan seseorang dalam kegiatan kelompok atau organisasi, yang tidak hanya berperan dalam pencapaian tujuan bersama, tetapi juga dalam memikul tanggung jawab kolektif atas jalannya kegiatan tersebut.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan bentuk keterlibatan aktif masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu kegiatan pembangunan, organisasi, maupun proses politik. Partisipasi tidak hanya dipahami sebagai tindakan memberikan suara atau hadir dalam suatu kegiatan,

tetapi juga mencerminkan rasa memiliki, tanggung jawab, serta kesediaan untuk berkontribusi demi tercapainya tujuan bersama.

2.1.2 Definisi Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih merupakan bagian penting dari partisipasi politik yang mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya melalui kegiatan pemilihan umum. Partisipasi ini tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan hak pilih, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan warga negara dalam menyalurkan kedaulatan rakyat. Wardhani (2018) menjelaskan bahwa partisipasi politik, termasuk partisipasi pemilih, merupakan wujud keikutsertaan masyarakat dalam proses demokrasi melalui pemilu sebagai sarana utama dalam menentukan pemimpin.

Lebih lanjut, partisipasi pemilih juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara, karena menunjukkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik dan memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang terbentuk (Fathurokhman, 2021). Selain itu, partisipasi pemilih mencerminkan keterlibatan aktif warga negara yang tidak hanya terbatas pada pemberian suara, tetapi juga mencakup kesadaran, keikutsertaan, serta peran dalam berbagai tahapan pemilu (Samidi & Kusuma, 2024). Bahkan, partisipasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai aktivitas politik lainnya seperti mengikuti kampanye, menjadi relawan, hingga terlibat dalam kegiatan yang mendukung jalannya proses demokrasi (Ibrahim, 2022). Dengan demikian, partisipasi pemilih dapat dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pemilu sebagai bentuk pelaksanaan hak politik sekaligus indikator keberhasilan demokrasi.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Teorell et al. (2007), tipologi partisipasi politik dapat dibedakan ke dalam lima dimensi, yaitu:

1. *Electoral Participation* (Partisipasi Elektoral): Merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam kegiatan pemilu, khususnya melalui pemberian suara pada saat pemilihan umum.
2. *Consumer Participation* (Partisipasi Konsumen): Partisipasi ini mencakup aktivitas warga sebagai konsumen politik yang kritis, seperti memberikan sumbangan untuk amal, melakukan boikot, menandatangani petisi, maupun terlibat dalam konsumsi politik (*political consumption*).
3. *Party Activity* (Aktivitas Partai): Yaitu keterlibatan aktif individu dalam kegiatan partai politik, baik dengan menjadi anggota, melakukan pekerjaan sukarela, maupun menyumbangkan dana untuk mendukung kegiatan partai politik.
4. *Protest Activity* (Aktivitas Protes): Meliputi tindakan warga dalam bentuk aksi protes, seperti demonstrasi, pemogokan, dan berbagai kegiatan unjuk rasa lainnya.
5. *Contact Activity* (Aktivitas Kontak): Merupakan partisipasi politik dengan cara menghubungi lembaga pemerintah, politisi, atau pejabat publik untuk menyampaikan aspirasi maupun kepentingan masyarakat.

Kemudian, menurut Newton & Deth (2017) bentuk partisipasi politik terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Konvensional: Mencakup aktivitas yang sah dan sesuai aturan dalam sistem politik, seperti memberikan suara dalam pemilu, terlibat dalam diskusi politik melalui forum resmi, menjadi anggota partai politik atau organisasi, dan menghadiri rapat umum atau kampanye

2. Non Konvensional: Lebih menekankan pada sikap pasif atau penarikan diri (*withdrawal*) dari proses politik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak menggunakan hak pilih, tidak mengikuti kampanye, menolak terlibat dalam organisasi politik, hingga menunjukkan sikap apatis terhadap isu politik.

Menurut Anggara (2013), tipologi partisipasi politik secara umum dibagi menjadi tiga jenis, yakni:

1. Partisipasi aktif, yaitu bentuk keterlibatan masyarakat yang mencakup proses input dan output kebijakan, seperti menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, serta melaksanakan hasil keputusan.
2. Partisipasi pasif, yaitu bentuk keterlibatan yang hanya terbatas pada menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah, tanpa terlibat dalam proses perumusannya.
3. Kelompok apatis (*golput*), yakni individu atau kelompok yang memilih untuk tidak terlibat dalam proses politik karena kekecewaan atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang berjalan.

2.1.4 Faktor-Faktor Partisipasi

Menurut Surbakti (1992), terdapat dua variabel utama yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik individu dalam suatu sistem politik. Pertama, adalah tingkat kesadaran pemilih terhadap keberadaan dan fungsi pemerintah. Kesadaran politik ini mencakup pemahaman individu mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti hak untuk berpartisipasi secara politik, hak ekonomi, perlindungan hukum, serta kewajiban dalam bidang sosial maupun ekonomi. Kedua, faktor yang turut menentukan adalah bagaimana masyarakat menilai dan memberikan apresiasi terhadap kebijakan serta pelaksanaan program-program

pemerintahan. Jika kebijakan dianggap berpihak dan dirasakan manfaatnya secara langsung, maka kemungkinan besar partisipasi pemilih akan meningkat. Sebaliknya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dapat menurunkan tingkat keterlibatan politik warga negara.

Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih menurut Sa'ban (2019) yaitu:

1. Perangsang Politik: Merupakan dorongan atau motivasi yang diberikan oleh pihak tertentu, misalnya pemerintah atau organisasi, untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti pemilihan umum atau diskusi politik.
2. Karakter Pribadi: Merujuk pada kesadaran, kepedulian, dan sikap individu yang mendorong dirinya untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, termasuk dalam pemilihan umum.
3. Karakter Sosial: Menggambarkan pengaruh lingkungan sosial seseorang, baik melalui kelompok, organisasi, maupun interaksi masyarakat, yang dapat membentuk keterlibatan individu dalam kegiatan politik.
4. Keadaan Politik: Mengacu pada kondisi atau situasi politik dan sosial di suatu wilayah yang dapat menciptakan suasana kondusif, sehingga masyarakat terdorong untuk ikut serta dalam aktivitas politik.

2.2 Pemungutan Suara Ulang

2.2.1 Definisi Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan proses pengulangan pemungutan atau penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU dapat dilakukan

apabila terjadi situasi luar biasa seperti bencana alam atau kerusuhan yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan ini diperkuat kembali dalam Pasal 372 ayat (2) dalam undang-undang yang sama. Adapun yang dimaksud dengan pemungutan suara adalah proses di mana pemilih memberikan suaranya di TPS dengan cara mencoblos nomor urut, nama, atau foto pasangan calon. Pengertian ini merujuk pada Pasal 1 angka 21 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui melalui PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan calon anggota legislatif sebagai representasi kehendak rakyat.

2.2.2 Syarat Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang (PSU) terjadi karena adanya situasi atau kejadian yang berlangsung saat proses pemungutan suara yang menurut ketentuan undang-undang dikategorikan sebagai kesalahan atau pelanggaran, sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PSU. Berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PSU dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kerusuhan ataupun bencana alam yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat dimanfaatkan atau proses penghitungan suara tidak dapat terlaksana.
2. Pemungutan suara harus diulang jika dalam proses pemeriksaan dan pengawasan oleh petugas Pengawas TPS ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a. Terbukanya kotak suara yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara secara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
- b. Adanya surat suara yang diberi tanda khusus seperti tanda tangan atau alamat pemilih atas permintaan KPPS,
- c. Anggota KPPS secara sengaja atau tidak sengaja merusak lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh pemilih sehingga menyebabkan surat suara tersebut tidak sah,
- d. Ditemukannya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan juga tidak memiliki KTP elektronik.

2.3 Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih tidak terbentuk secara independen, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa di antaranya mencakup isu-isu dan kebijakan politik, serta faktor agama, di mana sekelompok masyarakat mendukung kandidat tertentu karena dianggap merepresentasikan keyakinannya. Selain itu, faktor kelas sosial juga dapat menjadi pertimbangan, ketika pemilih memilih calon yang dinilai mewakili posisi sosial mereka (Hemay & Munandar, 2016).

Pendekatan perilaku tidak hanya berfokus pada perilaku dan aktivitas manusia, tetapi juga pada orientasi individu terhadap aktivitas tertentu, seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, maupun harapan. Dengan dasar pemikiran bahwa perilaku politik merupakan bagian dari keseluruhan perilaku manusia, maka pendekatan ini bersifat interdisipliner. Artinya, kajian tidak hanya menelaah faktor personal, tetapi juga mencakup aspek budaya, sosiologis, serta psikologis (Budiardjo, 2007).

KPU menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan utama dalam memahami perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Ketiganya erat kaitannya dengan prinsip pemilu yang *luber, jurdil*, serta bebas dari praktik politik uang (KPU, 2022).

1. Pendekatan sosiologi menekankan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh faktor budaya dan personalisasi politik. Hal ini terlihat dari media kampanye, seperti spanduk, *banner*, atau *billboard*, yang lebih menonjolkan figur ketua umum partai daripada lambang partai maupun penjelasan visi, misi, dan program yang semestinya menjadi sarana pendidikan politik.
2. Pendekatan psikologi berfokus pada tiga aspek utama, yaitu identifikasi kepartaian, orientasi terhadap kandidat, serta orientasi terhadap isu-isu kampanye.
3. Pendekatan ekonomi memandang perilaku pemilih sebagai bentuk pilihan rasional (*rational choice*), di mana mereka mendukung partai atau kandidat yang dianggap memberikan manfaat nyata.

2.4 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan bentuk pemilu yang dilaksanakan pada level lokal. Oleh karena itu, secara substansi, makna dan tujuan dari Pilkada tidak berbeda dengan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Perbedaannya terletak pada cakupan wilayah: jika pemilu nasional mencakup skala yang lebih luas, maka Pilkada berfokus pada tingkat daerah dengan tujuan memilih pemimpin lokal (Johannes, 2020).

Dalam konteks yang lebih praktis, penyelenggaraan Pilkada di Indonesia menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan demokrasi secara menyeluruh. Pilkada yang kini dilaksanakan secara langsung mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur

dalam konstitusi. Dengan demokratisasi yang berlangsung di tingkat lokal, diharapkan pemimpin yang terpilih benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat.

Pilkada langsung pertama kali dimulai pada bulan Juni 2005. Dalam rentang waktu antara Juni 2005 hingga Juni 2006, Pilkada telah diselenggarakan di 250 wilayah di Indonesia, yang mencakup 10 provinsi, 202 kabupaten, dan 38 kota. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dilakukan untuk memilih pasangan calon yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau melalui jalur perseorangan.

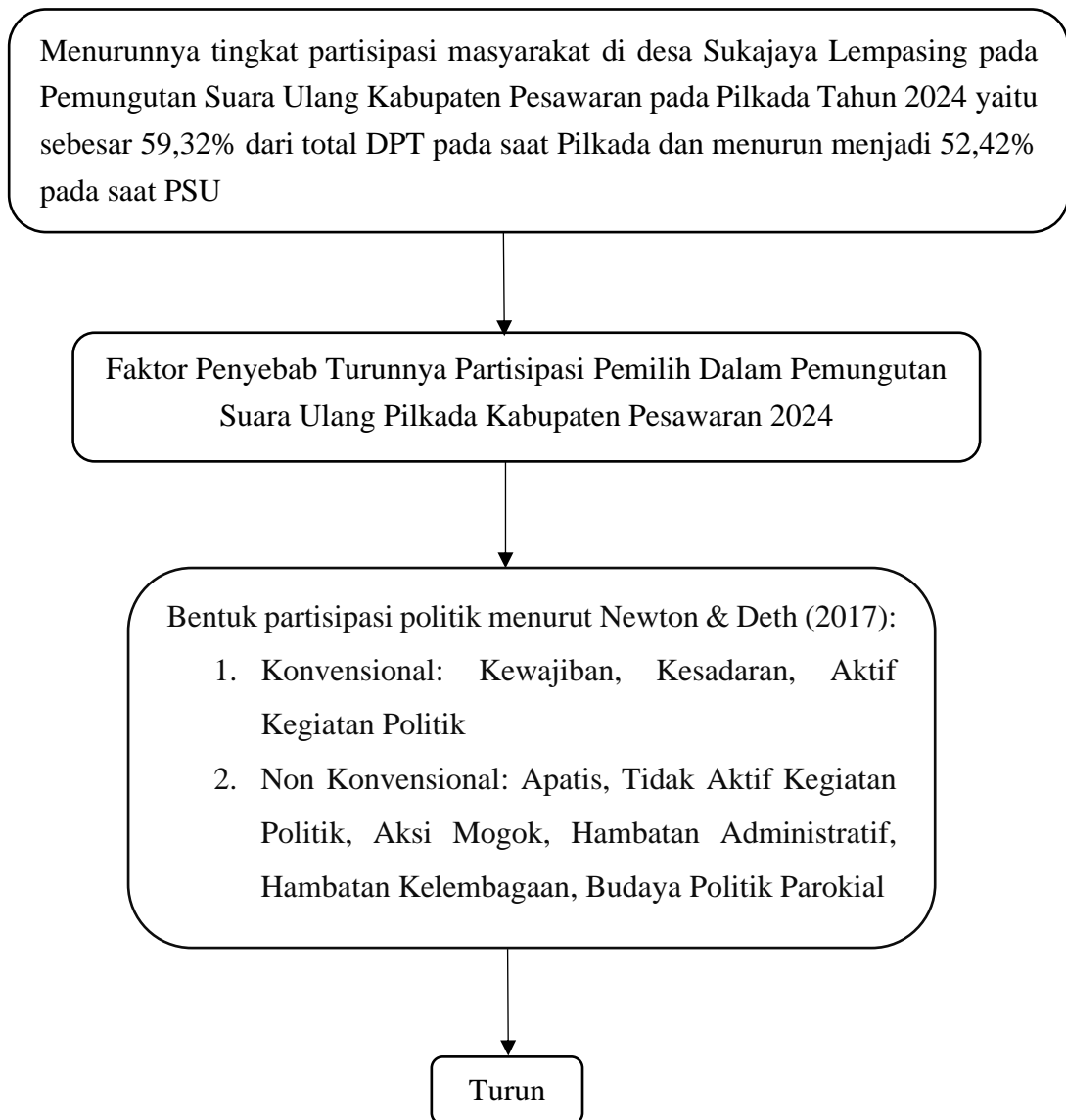
1. Peserta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon apabila memiliki minimal 15% jumlah kursi di DPRD, atau memperoleh paling sedikit 15% dari total suara sah dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Bakal calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib memperoleh dukungan dari sejumlah pemilih yang memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan untuk memilih:
 - a. Gubernur dan wakil gubernur pada tingkat provinsi,
 - b. Bupati dan wakil bupati pada tingkat kabupaten,
 - c. Walikota dan wakil walikota pada tingkat Kota.
4. Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:
 - a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih,
 - b. Proses pencalonan,

- c. Pengadaan serta pendistribusian logistik pemilu sesuai norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPU,
- d. Pelaksanaan kampanye,
- e. Masa tenang menjelang hari pemungutan suara,
- f. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,
- g. Penetapan hasil akhir pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah,
- h. Pengucapan sumpah/janji oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

2.5 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2013), kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara indikator yang akan diteliti. Naamy (2019) menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah bagian dari landasan teori dalam penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan alasan atau argumentasi logis yang mendasari perumusan hipotesis. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran menjelaskan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan acuan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis tersebut akan diterapkan dalam kerangka konseptual yang sesuai dengan penelitian tentang “Faktor Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024 (Studi Pada Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan)”.



Gambar 3. Kerangka Pikir.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan perilaku. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik maupun pendekatan kuantitatif lainnya (Nugrahani, 2014). Sementara itu, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah, keadaan, atau fenomena sebagaimana adanya.

Fiantika dkk. (2022) juga menjelaskan pendekatan perilaku pada dasarnya berkaitan dengan pola-pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bahasa dan penggunaannya, ritual, serta hubungan sosial. Melalui pendekatan ini, tugas analitis difokuskan pada upaya mendefinisikan dan menjelaskan bagaimana individu menggunakan bahasa, berperilaku, memahami serta mempertimbangkan objek di sekitarnya, dan secara keseluruhan mengelola kehidupan sehari-hari dalam lingkungan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan perilaku untuk mengeksplorasi faktor penyebab menurunnya partisipasi pemilih saat PSU Kabupaten Pesawaran tahun 2024 di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan.

Jika dilihat dari aspek metode penelitian, teori, dan lokasi penelitian, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Dari sisi metode, beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Albert Hernando Santoso dan Mulyana (2023), Akbar Karunia Ramadhani dkk. (2025), serta Zakly Hanafi Ahmad dkk. (2025) memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena partisipasi politik secara mendalam berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Namun, penelitian Ismed Kelibay dkk. (2023) menggunakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan Abdul Latief dan Abd. Rahman (2025) menggunakan metode yuridis normatif, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang secara konsisten menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali pengalaman, persepsi, dan alasan masyarakat dalam pelaksanaan PSU.

Dari sisi teori, sebagian besar penelitian terdahulu membahas partisipasi politik secara umum tanpa menggunakan kerangka teori yang membedakan dimensi perilaku politik secara spesifik, sedangkan penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik menurut Newton dan Van Deth (2017) yang membagi partisipasi ke dalam dimensi konvensional dan non konvensional sehingga memberikan kerangka analisis yang lebih sistematis dan komprehensif.

Dari sisi lokasi, penelitian terdahulu dilakukan di berbagai wilayah seperti Sorong, Polewali Mandar, Balikpapan, Tulungagung, dan Jambi dengan cakupan wilayah yang lebih luas, sedangkan penelitian ini berlokasi secara spesifik di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sehingga memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap kondisi sosial dan perilaku politik masyarakat pada pelaksanaan PSU di tingkat desa. Dengan demikian, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dalam sebagian studi, sedangkan perbedaannya terlihat pada konsistensi metode kualitatif deskriptif, penggunaan teori partisipasi politik yang lebih komprehensif, serta fokus lokasi penelitian yang lebih spesifik sehingga memberikan kedalaman analisis yang lebih kuat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memperjelas batasan objek kajian sehingga peneliti tidak terjebak pada melimpahnya data di lapangan serta dapat menyaring informasi yang tidak berkaitan langsung dengan masalah dan tujuan penelitian. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus bersifat menyeluruh atau holistik, artinya peneliti melihat situasi sosial secara utuh yang mencakup aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain.

Penetapan fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu bagaimana bentuk partisipasi politik di desa Sukajaya Lempasing saat PSU menurut Newton & Deth (2017):

1. Konvensional: Pada aspek ini, peneliti akan menelaah bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik yang sah dan sesuai aturan, seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu atas dasar kewajiban dan kesadaran, mengikuti forum atau diskusi dan mengikuti kegiatan organisasi.
2. Non-Konvensional: Fokus ini mengkaji bentuk ketidakikutsertaan atau penarikan diri masyarakat dari proses politik. Hal ini tercermin dari sikap tidak menggunakan hak pilih seperti aksi mogok, tidak mengikuti kegiatan politik, hingga menunjukkan apatisme terhadap isu-isu politik yang berkembang.

Tabel 5. Bentuk Konkrit Partisipasi Politik oleh Newton & Deth (2017)

Dimensi	Sub Indikator	Bentuk
Konvensional	Kewajiban	Menggunakan hak suara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas dasar kewajiban sebagai warga negara.
	Kesadaran	Menggunakan hak suara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas

Dimensi	Sub Indikator	Bentuk
		dasar kesadaran diri individu masing-masing.
	Aktif kegiatan politik	Menghadiri forum, sosialisasi, atau diskusi resmi terkait penyelenggaraan PSU.
Non Konvensional	Apatis	Sikap acuh tak acuh atau tidak peduli masyarakat terhadap penyelenggaraan PSU.
	Sikap pasif terhadap kegiatan politik	Tidak menghadiri sosialisasi, forum, atau kegiatan politik di lingkungan desa, serta tidak peduli terhadap isu politik maupun hasil PSU.
	Aksi Mogok	Adanya aksi penolakan kolektif seperti mogok kerja atau boikot terhadap pelaksanaan PSU.
	Hambatan Administratif	Kurangnya kejelasan dalam penentuan lokasi TPS, jumlah TPS, serta aksesibilitas menuju tempat pemungutan suara memengaruhi partisipasi masyarakat dalam PSU.
	Hambatan Kelembagaan	Tidak adanya peran kelembagaan seperti KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan PSU di Sukajaya Lempasing.
	Budaya Politik Parokial	Kondisi ketika masyarakat memiliki perhatian yang rendah terhadap politik dan kurang terlibat dalam kegiatan politik.

Sumber: Newton & Deth, 2017

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti meneliti peristiwa yang terjadi dari objek yang akan diteliti guna mendapatkan data dan informasi yang akurat. Lokasi yang penulis ambil adalah di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut adalah karena kemudahan untuk memperoleh data dan tema yang peneliti angkat terdapat di lokasi.

Secara teoritis, Desa Sukajaya Lempasing menarik untuk dijadikan lokasi penelitian karena pada pelaksanaan PSU di kabupaten Pesawaran, desa ini tercatat memiliki tingkat partisipasi pemilih terendah, yaitu sebesar 52,42%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena penurunan partisipasi politik yang cukup signifikan dibandingkan dengan rata-rata partisipasi pemilih di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, secara metodologis lokasi ini sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam guna menemukan faktor-faktor yang menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman dinamika partisipasi politik dalam konteks PSU.

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan sumber data yang sangat penting untuk menyelesaikan penelitian hingga tahap pembuatan kesimpulan akhir (Sugiyono, 2013). Memilih informan yang tepat tidak hanya membantu dalam mendapatkan data yang relevan, tetapi juga memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan valid.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang digunakan untuk menentukan informan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dari sampel tertentu dengan

pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian. Pertimbangan-pertimbangan ini dilakukan agar informan yang dipilih memahami apa yang ditanyakan dan dimaksudkan oleh peneliti, sehingga memudahkan penelitian sesuai dengan objek yang diteliti (Sugiyono, 2013).

Beberapa informan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Alasan
1	Putri Ramadanti	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Pesawaran	Melaksanakan fungsi peningkatan partisipasi masyarakat, sosialisasi, dan pengelolaan SDM dalam penyelenggaraan PSU.
2	Fatihunnajah	Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan PSU serta pencegahan dan penindakan pelanggaran.
3	Paisal Udin	Ketua DPD PAN Kabupaten Pesawaran	Melaksanakan fungsi partai politik dalam proses kontestasi dan mobilisasi dukungan pemilih.
4	Edy Susanto	Kepala Desa Sukajaya Lempasing	Mengetahui dan mengoordinasikan kondisi sosial serta partisipasi masyarakat.
5	Andre Laksamana	PPS Desa Sukajaya Lempasing	Melaksanakan fungsi teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara PSU di tingkat desa.

No	Nama	Jabatan	Alasan
6	Elly	Panwasdes Desa Sukajaya Lempasing	Melaksanakan fungsi pengawasan langsung terhadap tahapan PSU di tingkat desa.
7	Rabudin	Tokoh Agama Desa Sukajaya Lempasing	Memiliki peran dalam memberikan pengaruh moral dan keagamaan terhadap sikap masyarakat.
8	Rusmin	Tokoh Adat Desa Sukajaya Lempasing	Berperan dalam menjaga nilai adat dan norma sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat.
9	Mala	PKK Desa Sukajaya Lempasing	Mewakili keterlibatan perempuan melalui PKK dalam partisipasi masyarakat.
10	Rofi	Gen Z Desa Sukajaya Lempasing	Merepresentasikan pandangan dan tingkat partisipasi pemilih muda.
11	Zulyanto	Perwakilan NU Desa Sukajaya Lempasing	Mewakili peran organisasi keagamaan NU dalam membentuk sikap dan partisipasi.
12	Amin Purnomo	Warga Desa Sukajaya Lempasing	Pengguna Hak Pilih.
13	Maria Ulfa	Warga Desa Sukajaya Lempasing	Pengguna Hak Pilih.
14	Tati	Warga Desa Sukajaya Lempasing	Pengguna Hak Pilih.
15	Agus Malik	Warga Desa Sukajaya Lempasing	Bukan Pengguna Hak Pilih.

No	Nama	Jabatan	Alasan
16	Rohma	Warga Desa Sukajaya Lempasing	Bukan Pengguna Hak Pilih.
17	Hasanudin	Warga Desa Sukajaya Lempasing	Bukan Pengguna Hak Pilih.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang didapat secara langsung dari objek penelitian dari kuisisioner dan wawancara. Kemudian, data sekunder yakni data yang didapat melalui dokumen-dokumen kepustakaan, seperti literatur, serta dari informasi dan instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat melalui pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang diajukan secara langsung. Data primer penelitian ini didapat melalui wawancara yang dilakukan bersama para narasumber di Desa Sukajaya Lempasing, KPU Kabupaten Pesawaran, Bawaslu Kabupaten Pesawaran, dan partai politik mengikuti panduan yang disusun untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan bisa diakses oleh peneliti melalui mendengar, melihat, dan membaca. Biasanya, data sekunder bersumber dari data primer yang telah dikaji oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, data sekunder yang dipakai mencakup literatur, artikel jurnal, serta situs web yang berkaitan dengan tema penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa prosedur, di antaranya:

1. Wawancara: Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa wawancara yaitu metode pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti dalam studi pendahuluan untuk menggali masalah yang perlu diteliti dan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam dari responden. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif dari responden serta mendalami aspek-aspek yang tidak terjangkau melalui observasi langsung.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap relevan dengan penelitian ini dimulai sejak tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan 09 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Oktober 2025, peneliti mewawancarai Edy Susanto, Kepala Desa Sukajaya Lempasing.
2. Pada tanggal 27 Oktober 2025, peneliti mewawancarai Mala, perwakilan PKK Desa Sukajaya Lempasing.
3. Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Andre Laksamana, PPS Desa Sukajaya Lempasing.
4. Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Rabudin, tokoh agama Desa Sukajaya Lempasing.
5. Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Rusmin, tokoh adat Desa Sukajaya Lempasing.
6. Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Zulyanto, perwakilan NU Desa Sukajaya Lempasing.
7. Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Rofi, Gen Z Desa Sukajaya Lempasing.
8. Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Maria Ulfa, pengguna hak pilih Desa Sukajaya Lempasing.

9. Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Tati, pengguna hak pilih Desa Sukajaya Lempasing.
 10. Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Rohma, bukan pengguna hak pilih Desa Sukajaya Lempasing.
 11. Pada tanggal 20 November 2025, peneliti mewawancarai Fatihunnajah, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran.
 12. Pada tanggal 29 November 2025, peneliti mewawancarai Paisal Udin, Ketua DPD PAN Kabupaten Pesawaran.
 13. Pada tanggal 05 Desember 2025, peneliti mewawancarai Putri Ramadanti, Kasubbag Partisipasi Masyarakat, Humas dan SDM KPU Kabupaten Pesawaran.
 14. Pada tanggal 09 Desember 2025, peneliti mewawancarai Elly, Panwasdes Desa Sukajaya Lempasing
 15. Pada tanggal 09 Desember 2025, peneliti mewawancarai Amin Purnomo, pengguna hak pilih Desa Sukajaya Lempasing.
 16. Pada tanggal 09 Desember 2025, peneliti mewawancarai Agus Malik, bukan pengguna hak pilih Desa Sukajaya Lempasing.
 17. Pada tanggal 09 Desember 2025, peneliti mewawancarai Hasanudin, bukan pengguna hak pilih Desa Sukajaya Lempasing.
-
2. Dokumentasi: Metode dokumentasi melibatkan informasi dari catatan-catatan penting dari individu atau lembaga, baik berupa karya monumental, gambar, ataupun tulisan. Dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan gambar oleh peneliti guna mendukung temuan-temuan penelitian. Selain itu, dokumen-dokumen tertulis seperti data monografi Desa Sukajaya Lempasing, dokumen PKPU, data-data DPT dan pengguna hak pilih dan arsip lainnya digunakan untuk memberikan konteks tambahan dan validasi terhadap data yang telah dikumpulkan.
 3. Observasi: Observasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara mengambil peran maupun tanpa mengambil peran dalam situasi yang

diamati (Nugrahani, 2014). Selain itu, observasi juga dipandang sebagai dasar dari segala ilmu pengetahuan, karena pada hakikatnya ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yang bersumber dari fakta mengenai realitas, dan fakta tersebut diperoleh melalui kegiatan observasi (Sugiyono, 2013).

3.7 Teknik Pengolahan Data

Sesudah data dikumpulkan, tahapan yang dilakukan selanjutnya yaitu mengolah data. Menurut Abdussamad (2021), teknik pengolahan data terdiri atas:

1. *Editing Data*. *Editing* data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk meninjau ulang data yang telah diperoleh guna memastikan validitasnya serta mempersiapkannya untuk tahap analisis selanjutnya. Dalam tahap ini, peneliti menyesuaikan hasil wawancara dengan pedoman pertanyaan penelitian, kemudian menyeleksi data yang relevan untuk penulisan.
2. Interpretasi data. Pada tahap interpretasi data, hasil penelitian yang sebelumnya telah disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel dianalisis lebih lanjut agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian. Interpretasi juga dilakukan pada data yang bersifat rahasia, dengan pemilihan diksi yang hati-hati untuk menghindari penafsiran yang dapat merugikan pihak tertentu.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara mengolah dan mengorganisasi data, kemudian memilahnya ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola, serta menelusuri pola-pola tertentu (Naamy, 2019). Metode analisis data yang diterapkan yaitu analisis interaktif sesuai dengan

pendekatan Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013), yaitu meliputi langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data. Reduksi data adalah proses penting untuk menyaring informasi mentah dari lapangan agar lebih terfokus dan terstruktur. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak relevan atau kurang signifikan akan dieliminasi, sementara data yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori tertentu. Proses ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola, mengeksplorasi keterkaitan antar data, serta mempermudah analisis selanjutnya.
2. Penyajian data. Penyajian data melibatkan penyusunan hasil temuan ke dalam bentuk yang terorganisir dan mudah dipahami, seperti tabel, grafik, diagram, atau peta konsep. Data yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori atau tema kemudian disusun untuk menunjukkan keterkaitan atau pola tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian yang baik memungkinkan peneliti maupun pembaca untuk memahami hasil penelitian secara komprehensif dan melihat hubungan antara variabel yang ada dengan lebih jelas.
3. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah tahapan akhir dalam analisis data, di mana peneliti mengevaluasi temuan-temuan utama untuk memberikan simpulan yang relevan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan bukti-bukti yang telah dianalisis dan disajikan sebelumnya, memastikan bahwa hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan terhadap data yang sudah ada.

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa validitas adalah tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Validitas ini menjadi aspek penting dalam penelitian karena memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kondisi atau kejadian yang sebenarnya berlangsung di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode sebagai metode untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan cara ini, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi data dari berbagai sumber untuk menentukan keandalan informasi yang dikumpulkan. Teknik ini membantu mengurangi bias subjektif dan meningkatkan akurasi data.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan PSU di Desa Sukajaya Lempasing, maka simpulan disusun berdasarkan dua dimensi partisipasi politik, yaitu konvensional dan non konvensional sebagai berikut:

1. Dimensi Partisipasi Politik Konvensional

Dimensi konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang dilakukan melalui cara-cara yang legal dan sesuai dengan prosedur demokrasi, seperti menggunakan hak pilih, memiliki kesadaran politik, serta terlibat dalam kegiatan politik.

a. Kewajiban

Penggunaan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab warga negara masih terlihat dalam pelaksanaan PSU. Sebagian masyarakat tetap hadir di TPS karena merasa memiliki kewajiban dalam menentukan pemimpin daerah, meskipun tingkat partisipasi belum merata.

b. Kesadaran

Kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih masih ada, namun belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Sebagian warga datang ke TPS atas kesadaran diri bahwa suara mereka penting bagi masa depan daerah.

c. Aktif Kegiatan Politik

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik seperti diskusi, kegiatan PKK, musyawarah desa, maupun kegiatan keagamaan masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

2. Dimensi Partisipasi Politik Non Konvensional

Dimensi non konvensional menunjukkan bentuk partisipasi politik yang ditandai dengan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik, baik karena faktor sikap maupun hambatan struktural.

a. Apatis

Sikap apatis menjadi salah satu faktor utama menurunnya partisipasi pemilih akibat kekecewaan terhadap pemilihan yang berulang serta anggapan bahwa hasil pemilihan tidak membawa perubahan signifikan.

b. Tidak Aktif Kegiatan Politik

Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan forum politik menunjukkan adanya sikap pasif, yang dipengaruhi oleh minimnya pelibatan tokoh masyarakat serta tidak aktifnya organisasi kemasyarakatan.

c. Aksi Mogok

Tidak ditemukan adanya aksi penolakan kolektif seperti mogok kerja atau boikot terhadap pelaksanaan PSU. Ketidakikutsertaan masyarakat lebih bersifat individual.

d. Hambatan Administratif

Jarak TPS yang jauh dan pengurangan jumlah TPS menjadi kendala nyata bagi sebagian masyarakat untuk hadir menggunakan hak pilih.

e. Hambatan Kelembagaan

Peran kelembagaan belum sepenuhnya optimal karena sosialisasi yang belum merata serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam tahapan PSU.

f. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial tercermin dari rendahnya orientasi politik masyarakat yang lebih memprioritaskan pekerjaan sehari-hari,

sementara faktor etnis tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan simpulan tersebut, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Partisipasi Politik Konvensional

Dimensi ini perlu diperkuat melalui peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik formal.

a. Kewajiban

Penyelenggara pemilu perlu menekankan pentingnya penggunaan hak pilih sebagai tanggung jawab warga negara melalui pendekatan yang lebih persuasif.

b. Kesadaran

Perlu peningkatan pendidikan politik dan literasi pemilih agar masyarakat semakin memahami pentingnya suara mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah.

c. Aktif Kegiatan Politik

Perlu memperbanyak forum diskusi, sosialisasi, dan kegiatan partisipatif yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

2. Dimensi Partisipasi Politik Non Konvensional

Dimensi ini perlu diminimalkan dengan memperbaiki faktor sikap maupun faktor struktural yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat.

a. Apatis

Strategi komunikasi politik perlu dikembangkan dengan menekankan manfaat nyata dari partisipasi politik agar masyarakat tidak merasa jenuh terhadap proses politik.

- b. Tidak Aktif Kegiatan Politik
Organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat diharapkan lebih aktif menjadi penghubung informasi politik agar masyarakat memiliki ruang untuk berdiskusi.
- c. Aksi Mogok
Meskipun tidak ditemukan aksi mogok, penyelenggara pemilu tetap perlu menjaga kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan komunikasi yang baik.
- d. Hambatan Administratif
Perlu perencanaan teknis yang lebih matang terkait penempatan TPS agar lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
- e. Hambatan Kelembagaan
KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait perlu meningkatkan koordinasi serta memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat desa.
- f. Budaya Politik Parokial
Perlu adanya pendekatan sosialisasi yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, seperti melalui kegiatan yang fleksibel dan berbasis komunitas, agar partisipasi politik dapat meningkat tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir. Media Press.
- Ahmad, Z. H., Romadhon, A., & Putri, R. J. 2025. Analisis Tingkat Penurunan Partisipasi Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Studi Kasus TPS 4 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 92-105.
- Akbar, I. 2016. Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 95-110.
- Anggara, S. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Budiardjo, M. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Fathurokhman, B. 2022. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu). *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(1), 51-59.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., ... & Ambarwati, K. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Habibillah, F., & Syamsir, S. 2024. Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 132-140.
- Halilah, S. 2022. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(II), 78-93.
- Hemay, I., & Munandar, A. 2016. Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih. *Politik*, 12(1), 1737-1748.

- Ibrahim, I. 2022. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato). *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(02), 370-393.
- Johannes, A. W. 2020. *Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah*. Cendikia Press.
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14-24.
- Kelibay, I., Kamaluddin, K., Nurjannah, S., Kadir, M. A. A., Rusdi, R., Refra, M. S., ... & Boinauw, I. 2023. Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 442-449.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). 2022. Tiga Pendekatan Perilaku Pemilih. [kpu.go.id](https://www.kpu.go.id). <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10876/tiga-pendekatan-perilaku-pemilih>. Diakses tanggal 05 September 2025.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. 2017. Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Latief, A., & Rahman, A. 2025. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(1), 463-472.
- Naamy, N. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah. LP2M UIN Mataram.
- Newton, K & Deth, J. W. V. 2017. *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta*. Bandung: Nusamedia.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018.
- Prasetyo, W. D., Harsan, T., & Pujiyana, P. 2019. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 1(1), 85-105.

- Purba, A. M. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Jurnal Publik Reform*, 8(2), 36-44.
- Purba, S. P., & Djamin, D. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 3(1), 25-36.
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. 2023. Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- Ramadhani, A. K., Saputra, F. A., & Alfarizy, M. S. 2025. Menurunnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Kabupaten Tulungagung Di Wilayah Desa Tiudan. *DINAMICALLY*, 1(1), 64-82.
- Sa'ban, L. A. A. 2019. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(2), 59-67.
- Samidi, R., & Kusuma, W. J. 2024. Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Mengimplementasikan Hak Warga Negara di Bidang Politik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 729-740.
- Santoso, A. H., & Mulyana, M. 2023. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 89-101.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. 2015. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *SHARE: Social Work Journal*, 5(1), 71-80.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Teorell, J., Torcal, M., & Montero, J.R. 2007. Political Participation: Mapping the Terrain. Dalam J. W. Deth., J. R. Montero & A. Westholm (Eds). *Citizenship and Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis*. London and New York: Routledge.
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wardhani, P. S. N., & Sukma, P. 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.

Wiguna, T. 2025. 64,50 Persen, Partisipasi PSU Pesawaran Anjlok Dibanding Pilkada 2024. IDN Times Lampung. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/64-50-persen-partisipasi-psu-pesawaran-anjlok-dibanding-pilkada-2024-00-5h6fh-yqxtj9>. Diakses tanggal 03 Juli 2025.